

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan reformasi dibidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut membawa perubahan fundamental dalam hubungan tata pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah (Nurlan Darise, 2008).

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga terjadi pelimpahan kewenangan yang meluas dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah serta memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran (Femi Bagoë, 2013). Pelaksanaan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menerangkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga menerangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, demi terwujudnya pemerintah yang baik (*good governance*), maka pemerintah berusaha mewujudkan dan mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan. Dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi yang semakin berkembang dan telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi dalam melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan (Harmadhani dan Yuli, 2013 : 25 - 33). Teknologi informasi itu sendiri merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau bisnis (Baig dan Gururajan, 2011), sedangkan sistem informasi yaitu penggunaan teknologi komputer didalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai (George dan William, 2003).

Penggunaan teknologi informasi kini tidak hanya digunakan oleh perusahaan saja, tetapi instansi pemerintahan juga menggunakannya. Manfaat yang dihasilkan antara lain dapat mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat, pengolahan data, perencanaan, dan lain-lain.

Wujud penerapan pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan pemerintah Kota Lumajang agar menciptakan efektivitas pengelolaan keuangan daerah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. Fungsinya sebagai alat bantu dalam penyampaian informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah secara elektronik. Yang menjadi keberhasilan penerapan teknologi informasi selain perangkat keras dan perangkat lunak juga ditentukan oleh pengguna teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul : **“PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH”**

1.2. Batasan Penelitian

Menguji Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Lumajang.

1.3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah?
- b. Bagaimana tahapan-tahapan dalam menginput data ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam menginput data ke Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini, antara lain :

- a. Bagi Penulis

Sebagai alat bantu untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan administrasi keuangan yang baik dalam pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah.

- b. Bagi pemerintah daerah

Untuk memberikan suatu wacana kepada Pemerintah Daerah bagaimana penerapan suatu administrasi keuangan yang baik sehingga pengelolaan keuangan berjalan dengan baik.

c. Bagi pihak lain

Sebagai bahan informasi dan referensi untuk menambah ilmu pengetahuan maupun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut.

